

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN LURAH DALAM ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN KULIM KECAMATAN KULIM KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



RANTIKA LISTIHARA

NPM: 177110474

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang diberikanya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **“PeranLurahDalam ProgramPemberdayaanMasyarakat Di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru”**guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Kemudian pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan jugasalam proses penyusunan Skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syarul Akmal Latif., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Ibu Lilis Suryani, S. Sos., M. Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
4. Bapak Kartius Leseda S. Sos., M. AP selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses pembimbingan berlangsung.

5. Bapak dan ibu dosen ilmu Administrasi Publik yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang man telah memberikan ilmu dan wawasan yang begitu besar sehingga membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Kedua orang tua saya tercinta, adik-adik, beserta keluarga dan kerabat penulis yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan motivasi baik secara moral dan material kepadaya.

7. Semua teman-teman seperjuangan terutama kelas A jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017 dan sahabat-sahabat saya Bella Maharani, Silvia Ernita, Gina Fadillah, Redho Zainal dan Tirani yang selaku memberikan semangat dan kebersamaan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi yang penulis kerjakan ini mendapatkan keridhoan dari Allah SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin ya Allah.

Pekanbaru, 27 Oktober 2021

Penulis

Rantika Listihara

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SK PENGUJI.....	iv
BERITA ACARA	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	13
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Administrasi.....	13
2. Konsep Organisasi	17
3. Konsep Manajemen.....	21
4. Konsep Peran, peranan pemimpin	23
5. Konsep Pemerintah kelurahan.....	31
6. Konsep Pemberdayaan	37
B. Kerangka Pikir	44
C. Konsep Operasional.....	46
BAB III: METODE PENELITIAN.....	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Key Informan dan Informan	50
D. Teknik Penarikan Sampel	52
E. Jenis dan Sumber Data.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data	54
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	56
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	58
A. Sejarah Kelurahan Kulim.....	59
B. Kondisi umum Kelurahan Kulim.....	63
C. Kehidupan Beragama.....	64
D. Struk Organisasi Kelurahan Kulim.....	65
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Identitas Responden.....	66
B. Hasil Dan Pembahasan	67

C. Hambatan	80
BAB VI: PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR KEPUSTAKAAN	84
LAMPIRAN.....	86



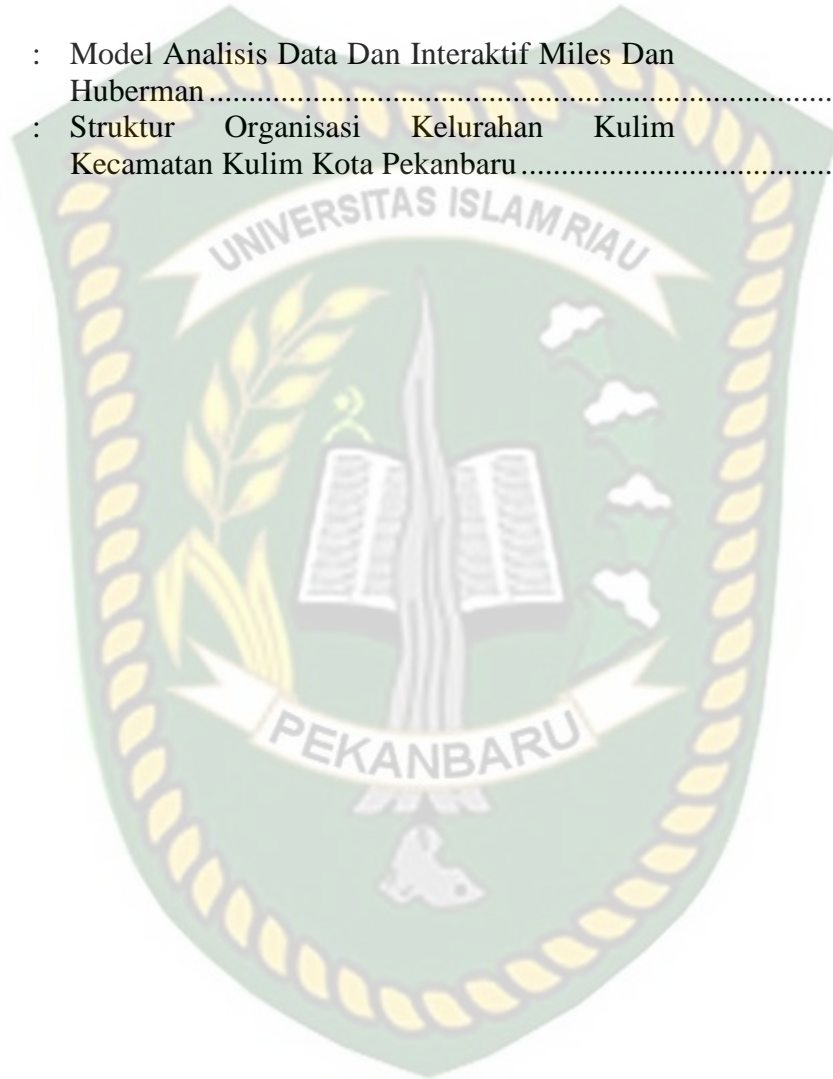
Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Penduduk Miskin Di Kelurahan Kulim Kota Pekanbaru	8
I.2	: Program-Program Pemberdayaan Dikelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	10
II.1	: Peran Pemimpin	28
II.2	: Konsep Oprasional Variabel Peran Lurah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	48
III.1	: Key Informan dan informasi Kantor Kelurahan Kulim	51
III.2	: Masyarakat Penerima Manfaat	51
III.3	: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Peran Lurah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	57
IV.1	: Pasca Pemekaran dan Sebelum Pemekaran	61
IV.2	: Peraturan Walikota Pekanbaru Tentang Batas Wilayah Kelurahan Pada Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru	62
IV.3	: Jumlah Sekolah Kelurahan Kulim Kota Pekanbaru	64
IV.4	: Sarana Prasarana Peribadatan Masyarakat Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	64
V.1	: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66
V.2	: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Peran Lurah Dalam Program Pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru.....	45
III.1 : Model Analisis Data Dan Interaktif Miles Dan Huberman.....	55
IV.1 : Struktur Organisasi Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Wawancara Kepala Kelurahan Tentang Peran Lurah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	88
2 : Daftar Wawancara Skretaris Lurah bTentang Lurahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	92
3 : Daftar Wawancara Kasi Pembangunan/Staff Tentang Peran Lurah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	96
4 : Daftar Wawancara Masyarakat Tentang Peran Lurah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	100
5 : Dokumentasi Penelitian Tentang Peran Lurah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	103
6 : Dokumentasi Pertemuan PKH, BLT	104
7 : Dokumentasi Masyarakat Menerima Manfaat Pajalai	106
8 : Dokumentasi Masyarakat Penerima PKH	107
9 : Dokumentasi Masyarakat Menerima Manfaat Jamur Tiram	109
10 : Dokumentasi Masyarakat Menerima Manfaat Servis Motor	110
11 : Dokumentasi Masyarakat Menerima Manfaat Pembibitan Ikan Lele	112
12 : Dokumentasi Masyarakat Menerima Manfaat BLT	113
13 : Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing	116
14 : Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	114
15 : Surat Keterangan Jurnal Online	117
16 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi	118

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru Peserta Ujian Sripsi yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rantika Listihara

NPM : 177110474

Program Studi : Administrasi Publik

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi : Peran Lurah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada Skripsi ini bersertaseluruh dokumen persyaratan yang melekat pada nya dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak ada unsur plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacuh pada kaedah-kaedah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Keseluruhan persyaratan administrasi, akademi, dan keuangan yang melekat pada ini adalah benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah saya bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan yang ada pada butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti dan serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan dari fakultas dan universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Oktober 2021

Menyatakan



Rantika Listihara

ABSTRAK**Peran Lurah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru**

Oleh:

Rantika Listihara

Peran lurahan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang ada dikekelurahannya, yang mana krgiatan pemberdayaan yang dilakukan tidak dilakukan secara rutin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran kelurahan dalam pemeberdayaan masyarakat di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru serta faktor penghambatnya. Teori yang digunakan penelitian adalah teori peran pribadi, peran pembuat keputusan dan peran sumber informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengempulan data, melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu Peran Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat, dari masalah kurang optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat karena masih ada dijumpai permasalahan kurangnya minat masyarakat yang akan mengikuti program pemberdayaan yang mana disebabkan kurangnya sosialisai dan penyuluhan pihak kelurahan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui arti penting dari program pemberdayaan ini. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam peran Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru dalam perencanaan program adanya masyarakat yang tidak ikut partisipasi dalam menjalankan program-program tersebut. Kesimpulan peneliti masih kurangnya minat masyarakat yang akan mengikuti program pemberdayaan yang mana ini disebabkan kurang berperannya pihak kelurahan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui arti penti dari program pemberdayaan. Saran Peneliti, bagi pemerintah kelurahan diharapkan untuk mensosilisasikan betapa pentingnya pemberdayaan untuk kemajuan masyarakat keluraha itu sendiri.

Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan

ABSTRACT

The Role of the Village Head in the Community Empowerment Program in Kulim Village, Kulim District, Pekanbaru City

By:

Rantika Listihara

The role of the village head is in implementing community empowerment in his village, where empowerment activities are not carried out routinely. The purpose of this study was to determine the role of the village in community empowerment in Kulim Village, Kulim District, Pekanbaru City and its inhibiting factors. The research method used is a qualitative method with data collection, through interviews, observations, and documentation. The result of this research is the role of Kelurahan. In Community Empowerment in Kulim Village, Kulim Subdistrict, Pekanbaru City, this has not been implemented properly, this can be seen, from the problem of less than optimal implementation of community empowerment because there is still a problem of lack of interest from the community who will take part in the empowerment program which is due to the lack of socialization and counseling from the village community to the community. so that people do not know the importance of this empowerment program. The obstacles that occur in the role of Kelurahan in Community Empowerment in Kulim Village, Kulim Subdistrict, Pekanbaru City in program planning are people who do not participate in carrying out these programs. The conclusion of the researcher is that there is still a lack of interest in the community who will take part in the empowerment program which is due to the lack of role of the village government in the community so that people do not know the meaning of the empowerment program. The researcher's suggestion is that the village government is expected to socialize how important empowerment is for the progress of the village community itself.

Keywords: Role, Empowerment

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Di dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa.

Seperti halnya tujuan pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Paradigma pembangunan baru menganggap bahwa pembangunan seharusnya dilakukan atas inisiatif dan dorongan dari masyarakat, jadi masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif.

Pembangunan harus dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah agar pembangunan berjalan dengan baik dengan komunikasi masyarakat dan pihak pemerintah, daerah, dalam proses pembangunan

masyarakat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat agar dapat terjalinnya komunikasi

pemerintah berkewajiban sebagai pemberi pelayanan, pemberdayaan serta dapat memberikan suasana baru kepada masyarakat agar mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat, untuk mendapatkan pasrtisipasi aktif harus ada peran Lurah selaku kepala instansi Pemerintah dan Daerah di Tingkat Kelurahan Kulim Kota Pekanbaru.

Lurah sebagai pemimpin didaerah kelurahan agar terciptanya proses pembangunan. Kelurahan dibangun berdasarkan undang undang nomor 23 Tahu 2014 tentang pemerintah daerah bahwa Kelurahan adalah wilayah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Kota.

Lurah sebagai pemimpin dan pelaksanaa proses pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Pasal 228 dan 229, di tuntutan agar bisa membuat masyarakat sejahtera dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dalam pemberdayaan masyarakat untuk bertujuan agar proses pembangunan berjalan sesuai tujuan pembangunan dan kemajuan suatu daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan pada Bab III Kelurahan pasal 25 Bagian Kelima Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah Pasal 25 Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang

diberikan oleh camat.

Tugas lurah meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi Lurah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu:

1. Motivasi

Memotivasi masyarakat agar bergerak aktif dalam menjalankan dan mengikuti proses pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan Kulim kota Pekanbaru. (Djamarah 2002: 34). Pengertian Motivasi merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang muncul adanya gejala perasaan, kejiwaan dan emosi sehingga mendorong individu untuk melakukan atau bertindak sesuatu yang disebabkan karena kebutuhan, keinginan dan tujuan. Motivasi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara seperti pemberian penghargaan, berperilaku baik menjadi tauladan bagi masyarakat, serta pengarahan dengan cara sebaik-baiknya memberikan arahan agar sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat.

2. Komunikasi

Komunikasi antara manusia merupakan suatu rangkaian proses yang halus dan sederhana. Selalu dipenuhi dengan berbagai unsur-sinyal, sandi, arti tak peduli bagaimana sederhananya sebuah pesan atau kegiatan itu.

Komunikasi antar manusia juga merupakan rangkaian proses yang beraneka ragam. Komunikasi adalah suatu hubungan simbiosis mutualisme baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat yang saling berinteraksi baik dalam urusan pemerintahan maupun urusan kemasyarakatan. Bagaimana peran seorang ditentukan dengan awal proses yaitu komunikasi dengan masyarakat, jika bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maka akan bisa memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat untuk merencanakan, proses pelaksanaan dan evaluasi program-program pemberdayaan masyarakat. Begitu juga sebaliknya jika seseorang memiliki komunikasi yang kurang baik maka bisa menghambat proses baik urusan kemasyarakatan maupun kehidupan sehari-hari.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan (empowerment) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungan sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimiliki.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-

kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005:41).

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013:113), pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian kemampuan dan keberanian ataupun daya dalam artian kekuasaan atau posisitawar.

Definisi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata "empower" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah to give power of authority dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable . Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau pemberdayaan. Menurut Robert Dahl (1983:50), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya.

Menurut Adisasmita (2006:35), pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti: Aspek Masukan atau Input, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), dana, peralatan, atau sarana, data, rencana, teknologi. Aspek Proses, seperti Pelaksanaan, Monitoring dan Pengawasan. Aspek Keluaran dan Output, seperti pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi. Konsep pemberdayaan dalam wacana

pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja serta kekuatan yang terletak pada setiap individu.

Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan, orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan suatu keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan.

Menurut Ketaren (2008: 178-183) pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penayadaran, pada tahap penayadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penayadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu', prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "demand") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar).

Sardlow (Adi, 2003:54) melihat berbagai pengetahuan yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Kata pemberdayaan mengesahkan arti adanya sikap mental yang tangguh.

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu: Kecenderungan primer. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan,

kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.

Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi agar idividu mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Proses tersebut saling terkait, dan agar kecenderungan primer dapat terwujud, sering harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyelesaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kelurahan Kulim Kota Pekanbaru ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Lurah dalam pemberdayaan masyarakat mengalami kendala atau permasalahan yang di hadapi maka penulis mencoba untuk mengkaji

permasalahan yang terjadi di kelurahan Kulim kota Pekanbaru yaitu komunikasi, antara pihak kelurahan dan masyarakat yang kurang baik serta jadwal pengawasan dan pengembangan usaha kelompok tani, ternak, serta perikanan di kawasan kelurahan untuk menunjang peran Lurah dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri, serta terbatasnya dana yang ada yang membuat kurangnya aktifitas kelurahan untuk mengawasi serta melaksanakan pembinaan dan pengarahan dalam pemberdayaan masyarakat. Kondisi Masyarakat Dikelurahan Kulim Kota Pekanbaru:

1. Kurang Berperannya Lurah Dalam Program-program yang ada
2. Masih adanya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan
3. Kurangnya kesadaran masyarakat atas program/ ikut serta masyarakat

Dari kondisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel I. 1 : Penduduk Miskin Dikelurahan Kulim Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (KK)
1	2018	116
2	2019	152
3	2020	210

Sumber: Kantor Kelurahan Kulim 2021

Pada tahun 2018 penduduk miskin di kelurahan kulim sebanyak 116 per kartu keluarga (KK), di tahun 2019 penduduk miskin di kelurahan kulim sebanyak 152 per kartu keluarga (KK), dan di tahun 2020 penduduk miskin bertambah sebanyak 210 per kartu keluarga (KK).

Berdasarkan di atas maka Lurah memunculkan program pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan dalam 3 tahun terakhir dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat di Kelurahan Kulim Kota Pekanbaru.

Dalam perkembangannya, upaya penurunan angka kemiskinan sudah dilakukan dalam banyak program pemerintah. Program ini dilaksanakan dalam rangka perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan (Sagala et.al, 2016).

Tidak hanya kegiatan yang dilakukan menjadi poros pemberdayaan, namun partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan mempunyai pengaruh signifikan. Pada umumnya pembangunan merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan secara terencana melalui tahapan pembangunan yang tujuannya yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan mandiri. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan, dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri.

Salah satu peranan penting pemerintah desa atau kelurahan yaitu dapat menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat. Namun secara umum

dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana penilaian kinerja pemberdayaan pemerintah pada masyarakat terkesan sebagai formalitas belaka, tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat menerima begitu saja pembangunan desa yang dijalankan sehingga sumber daya mereka tidak berkembang, Musrenbang desa atau kelurahan sebagai bagian pemberdayaan sumber daya masyarakat hanya sekadar tuntutan tugas semata.

Pemerintah kelurahan harus mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi pelaksanaan atau implementasi pada proses pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat akan terlaksana dengan baik bila peran pemerintah serta masyarakat dan partisipasinya juga baik.

Oleh karena itu peran pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sangat penting demi kelancaran pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif.

Adapun kegiatan yang ada di masyarakat yakni untuk pengembangan ekonomi di kelurahan Kulim Kota Pekanbaru ini Perempuan dan laki-laki mendapat pelatihan seperti berikut:

Tabel I. II : Program-program dikelurahan Kulim Kota Pekanbaru.

No	Program Pemberdayaan Kelurahan Kulim
1	Pelatihan Pembibitan Ikan Lele Dari Dinas Perikanan dan Kelautan
2	Pelatihan Jamur Tiram Dari Dinas Pangan, tanaman Pangan dan Holtikultural
3	Pelatihan Servis HP Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Pelatihan Pejalai(padi, jagung, dan kedelai) Dari Dinas pangan, tanaman Pangan dan Holtikultural
5	Pelatihan Servis Motor Dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Sumber : Kantor Lurah Kulim, 2021

Pelatihan pembibitan ikan lele dari dinas perikanan kelautan, program tersebut untuk Perempuan, pelatihan jamur tiram, diutamakan untuk Perempuan dan pelatihan pejalai untuk perempuan dan laki-laki. Pelatihan servis hp diutamakan laki-laki, dan pelatihan servis motor diperuntukan laki-laki.

Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, sehingga terbebas dari kemiskinan. Hal tersebut merupakan tugas Lurah sebagai pemimpin dalam lingkup kelurahan yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu dalam pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Upaya tersebut menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Pemerintah Kelurahan

dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim KotaPekanbaru.

2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan atau kendala-kendala peran Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim.

Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya atau sebagai bahan perbandingan tehadap penelitian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial bahwa dia tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus melakukan kerjasama dengan orang lain yang mempunyai ide dan tujuan yang sama, dengan melakukan administrasi maka tujuan tersebut akan tercapai. Kedudukan administrasi tidak hanya terpaku pada legalistis yang kaku saja, akan tetapi akan berorientasi dinamis untuk melaksanakan aturan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Administrasi diartikan sebagai :

- a. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi
- b. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah
- d. Kegiatan kantor dan tata usaha

Menurut Leonard B. White (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 1955;1) menyatakan “Administration is process common to all group efforts, public or private, civil or military, large scale or small scale...etc.” White memberikan pemahaman bahwa administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya

terdapat disetiap usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, usaha besar maupun kecil.

Menurut Stephen P. Robbins (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 1983) menyatakan “Administration is the universal process of efficiently getting activities completed with and through other people”. Robbins memahami administrasi ini sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan secara efisien melalui kerjasama dengan orang lain.

Menurut Dwight Waldo (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 1996:24) menyatakan “Administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi”.

Menurut Gulick (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 1937) menyatakan “Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives”. Gulick memberikan pemahaman bahwa administrasi adalah berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Herbert A. Simon (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 1959:3) menyatakan “Administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals”. Simon memberikan pemahaman bahwa administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Administrasi sebagai objek ilmu studi ilmu administrasi, merupakan fenomena masyarakat modern. Dalam arti sempit menurut sudikin dan darmai (2011:4), administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi

secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis serta untuk memudahkan memperolehnya kembali.

Menurut Ordway tead (dalam zulkifli, 2009;9), administrasi adalah penataan dari kegiatan-kegiatan individu-individu eksekutif dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan menyediakan sarana dan prasarana bagi upaya-upaya kerja sama kelompok individu-individu untuk merealisasikan beberapa tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Pfifne dan Presthus (2009;7), orang dapat memulai dengan menyatakan bahwa admnistrasi adalah suatu proses umum yang menandai (merupakan karakter) semua usaha bersama.

Menurut Brooks Adams (dalam Syafri, 2012;9), administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain didalam suatu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai suatu kesatuan.

Menurut Galdden (dalam Syafri, 2012;9), langkah pertama adalah mendefinisikan administrasi sebagai aktifitas manusia yang bersifat umum yang dilaksanakan, baik didalam maupun diluar lingkungan public, dan didalam masyarakat manapun.

Menurut William H.Newman (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 1963) menyatakan “Administration has been defined as the guidance, leadership and control of effort of a group of individuals towards some common goals”. Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha-usaha kelompok individu terhadap tercapainya tujuan bersama.

Menurut Sondang P.Siagian (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 2004:2) menyatakan Administasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya .

Sehingga dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan mengenai administrasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan pembangian tugas-tugas dan konsensus serta di lakukan dengan rasionalitas yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sekelompok orang tersebut. Administrasi adalah sebagai objek studi ilmu administrasi merupakan fenomena masyarakat modern. Dalam masyarakat modern sebagian kegiatan-kegiatan para masyarakatnya dilangsungkan dalam organisasi modern. Dengan demikian eksistensi administrasi berkaitan erat hubungannya dengan organisasi.

Administrasi seperti yang kita ketahui di bagi menjadi 2 yaitu administrasi niaga dan administrasi Negara, administrasi niaga merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan atau provit. Sedangkan Administrasi Negara adalah keseluruhan aktivitas yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh unsur penyelenggara Negara dalam rangka mencapai satu atau sejumlah tujuan yang ideal dan substansial yang telah ditetapkan sebelumnya. (Zulkifli, 2005;57)

Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintahan diorganisasi, dilengkapi tenaga-tenaganya,

dibiayai, digerakkan, dan di pimpin, Edward H. Litchfield (Afiffuddin 2010: 24). Administrasi Negara adalah administrasi dari Negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan, Atmosudirdjo (Afiffuddin 2010: 24) selanjutnya Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Siagian (dalam Zulkifli, 2005:57).

Sehingga dari konsep-konsep yang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah suatu usaha kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan kesepakatan bersama, pembagian tugas dan adanya tujuan yang akan dicapai. Sedangkan Administrasi Negara adalah keseluruhan aktivitas yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh unsur penyelenggara Negara yaitu pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Negara, Seluruh kegiatan administrasi, tumbuh kembang administrasi dilakukan dalam suatu tempat yang disebut organisasi.

2. Konsep Organisasi

Organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relative serta tanggung jawab masing-masing individu dan bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja tepat dan sesuai.

Dalam pelaksanaan Administrasi, organisasi merupakan suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Menurut Stephen P.Robbins (dalam Beddy Iriawan Maksudi, 1990;4) “An organization is a

consciously coordinating social entity, with a relatively identifiable boundary, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals. That's mouthful of words, so let us break it down into its more relevant parts." Pemahaman Robbins terhadap organisasi dapat diartikan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut John D. Millet (dalam Sutarto 1998:23) " In addition organization is people working together, and so it takes on characteristics of human relationships with are involved in group activity". Millet memahami organisasi adalah orang-orang yang bekerjasama , ini mengandung ciri-ciri dari hubungan manusia yang timbul dalam aktivitas kelompok.

Organisasi merupakan wadah atau tempat di aplikasikannya setiap aspek studi administrasi. Siagian (2003: 37) mendefenisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dan hierarkis serta untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai proses Zulkifli (2005; 26), organisasi serangkaian aktivitas kolektif dari orang-orang yang awali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan tugas.

Sedangkan pengertian organisasi menurut Hasibuan, (2004: 120) adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terakomodasi dari kelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi merupakan wadah atau alat dimana segenap keinginan dan kemampuan sejumlah atau

sekumpulan orang bersatu, mengikat diri dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Manurut Syafri (2013;12), organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktifitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

Menurut Massie (1964;64), organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggotanya, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktifitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Unsur-unsur organisasi :

- a. Dua orang manusia atau lebih
- b. Tujuan (bersama) yang hendak dicapai
- c. Kerjasama (pembagian kerja)
- d. Fasilitas/material/perlengkapan
- e. Legalitas formal/pengakuan dari pejabat yang berwenang

Dari definisi-definisi diatas, bisa terlihat unsur-unsur organisasi yang terdiri dari: kumpulan orang, kerjasama, tujuan bersama serta sumber daya manusia yang semuanya merupakan unsur penting dalam organisasi bila mana tidak dikelola dengan baik maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal untuk mengelola sumber daya organisasi digunakan manajemen dan unsur-unsur dalam manajemen sebagai bagian dari proses pencapaian tujuan.

Definisi Massie (dalam Zulkifli dan yogia 2014: 16) mengatakan organisasi adalah merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktifitas- aktifitasnya kearah tujuan bersama.

Kemudian Soffer (dalam Zulkifli dan yogia 2014:16) mengatakan organisasi adalah tindakan pendistribusian peranan kepada setiap anggota untuk melaksanakan rincian tugas tertentu dalam rangka upaya menghasilkan beberapa bentuk produk.

Supaya mencapai tujuan organisasi perlunya manajemen didalamnya. Definisi ahli memandang manajemen dari sudut yang berbeda yaitu beberapa ahli memandang manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, ahli lain memandang manajemen sebagai suatu proses dan sebagian profesi, Badrudin (dalam Surdaryono, 2017:4).

Di lain pihak Manullang (dalam Sudaryono, 2017:5) mengemukakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, Penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumberdaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

George R. Terry dan Leslie (dalam Sudaryono, 2017: 6) mengartikan manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata. Agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya, terutama dalam menganalisis data, ada beberapa konsep penelitian diantaranya.

3. Konsep Manajemen

Suatu organisasi akan tetap berjalan memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasinya, ilmu dan strategi terdapat dalam konsep manajemen dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Manajemen adalah penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan berbagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang laon. Manajemen berasal dari kata "*manage*" yang artinya mengatur.

Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Secara umum, manajemen isa diartikan sebagai seni dan ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola manusia dan material untuk mencapai tujuan. Sebagai alat pelaksana dari administrasi, manajemen diperlukan agar tujuan organisasi bisa dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Siagian (dalam Zulkifli, 2005: 311) merumuskan batasan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Sebagai mana kita ketahui bahwa dalam setiap organisasi perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen sebagai landasan pencapaian tujuan organisasi begitu juga dengan menggunakan fungsi manajemen pada kantor atau organisasi pemerintahan yang mempunyai tujuan dalam rangka kesejahteraan sosial masyarakat dan

menjalankan program-program sosial.

Stoner, et.al. (1996;7) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, menngorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

George R. Terry (dalam Sarwoto 1983: 46) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating, and controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetaapkan semula.

Menurut Longenecker (dalam Nawawi, 2013;11), mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kegiatan manajer dalam mengambil keputusan, mengkoordinasikan usaha-usaha kelompok, dan kepemimpinan.

Menurut Mondy dan Premeaux (Syafarudin, 2005;4-42), manajemen adalah proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Menurut Andrew (dalam effendi 2014;3), menguraikan manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan , pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

The Liang Gie (1993;14), berpendapat bahwa manajemen itu suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama, yaitu : perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengontrolan, dan penyempurnaan.

Siagian (1986;5), merumuskan batas manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Manajemen sebagai motor dari suatu system administrasi, secara eksplisit terlihat dalam pendapat Waldo (1986;27), manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang tentunya menggunakan tenaga orang.

4. Konsep Peran, Konsep Peranan Pemimpin

Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Sedangkan menurut Poerwadarminta (1995: 571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang

atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat.

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. (Rivai, 2003:148)

Menurut Soerjono Soekanto (2009: 212), "Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan". Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto (2009 : 212) menjelaskan : "Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, pembedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya".

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu perbuatan/kegiatan seseorang atas sesuatu pekerjaan dari suatu kedudukan apa bila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peran. Jika dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

Istilah kepemimpinan berasal dari bahasa Inggris leadership berasal dari kata dasar pimpin yang artinya bimbing atau tuntunan, dari kata pimpin lahirlah

kata kerja memimpin, membimbing, dan menuntun. pemimpin akan timbul dari kelompok-kelompok yang sama sekali yang tidak terorganisir, namun kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memimpin secara efektif yang merupakan salah satu kunci untuk menjadi pemimpin yang efektif. (Isyadi,).

Kepemimpinan adalah adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Dalam pengertian lain kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sedangkan menurut KADARMAN (2001 : 143) adalah suatu proses untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan penugasan anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Menurut rivai (2006:2) Kepemimpinan adalah secara luas mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisai, memotivasi prilaku dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi prilaku peningkat untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Kepemimpinan lebih dari sekedar seperangkat keterampilan dan keahlian. Kepemimpinan mempunyai kualitas personal halus yang agak sulit dilihat, tetapi sangat berpengaruh. Pengertian kepemimpinan menurut Malayu Hasibuan, (2006) adalah : “cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai

tujuan organisasi”. Sedangkan menurut (Rost, Joseph C, dalam Triantoro Safaria,2004) : “Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama”. Kepemimpinan didefinisikan juga oleh (Terry, George R, dalam Kartini Kartono, 2005) yaitu : “kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok”.

Menurut Rivai, (2005) menyatakan bahwa kepemimpinan secara luas, adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi.

Sedangkan menurut Hasibuan, (2003) kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Thoha (2005 : 121), kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Disini dapat ditangkap suatu pengertian bahwa jika seseorang telah mulai berkeinginan untuk mempengaruhi orang lain, maka kepemimpinan itu telah dimulai.

Sedangkan menurut Anoraga (2004 : 2), kepemimpinan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Keberhasilan seorang pemimpin

tergantung kepada kemampuan untuk mempengaruhi. Dengan kata lain kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi yang baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud menggerakkan orang-orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak-kehendak pemimpin itu.

Berbeda menurut Silalahi (2006 : 184), kepemimpinan sebagai aktivitas mempengaruhi orang lain, baik secara individu maupun kelompok agar melakukan aktivitas dalam usaha mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Artinya kepemimpinan mengarahkan bawahannya kepada kegiatan-kegiatan yang dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Seirama fungsi pemimpin yang perlu dilakukan para pemimpin, mereka memiliki tiga peran utama menurut Henry Mintzberg (Badeni, 2004:2) yang biasanya dijalankan oleh pimpinan dalam meningkatkan suatu kinerja atau manajemen dalam suatu organisasi, yang rinciannya sebagaimana pada:

Tabel II.1 :Peranan Pemimpin

<i>Interpersonal role</i> (Peranan pribadi)	<i>Decision making</i> (peranan pembuat keputusan)	<i>Informationalrole</i> (peranan sumber informasi)
<i>Figur head</i> , pemimpin adalah merupakan figur / contoh bagi organisasi	<i>Enterpreneur</i> , faktor keahlian yang harus dimiliki oleh pimpinan sesuai dengan level kepemimpinannya, seorang pemimpin harus mandiri, mempunyai keahlian.	<i>Monitor and Desiminator</i> , pemimpin harus mampu memonitor dan menyaring berbagai informasi guna kepentingan organisasi
<i>Leader</i> , pimpinan organisasi, mengarahkan, memberi perintah, bimbingan dan memberi petunjuk bagi anggota organisasi	<i>Distrubance handler</i> , pemimpin harus menghilangkan rintangan-rintangan yang dapat menghalangi jalannya organisasi	<i>Spoke person</i> , pemimpin harus berperan sebagai pembicara bagi organisasi
	<i>Resorurce Allocation</i> , memiliki Kewenangan dalam mengendalikan penggunaan sumber daya organisasi	
<i>Liaison</i> , pimpinan sebagai penghubung bagi organisasi, dan penghubung diantara atasan,bawahan	<i>Negotiator</i> , pemimpin berpartisipasi dalam kegiatan negoisasi dengan organisasi lain dan individu.	

Sumber : Henry Mintzberg (1973)

1. Peran Pribadi (*The Interpersonal Roles*)

Fungsi ini dapat ditingkatkan melalui jabatan formal yang dimiliki oleh seseorang pemimpin dan antara pemimpin dengan orang lain. Fungsi interpersonal terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. Sebagai Simbol Organisasi (*Figur Head*) Kegiatan ini dilakukan dalam menjalankan fungsi simbol organisasi umumnya bersifat resmi, seperti menjamu makan siang dan contoh bagi organisasi
- b. Sebagai Pemimpin (*Leader*) Seorang pemimpin menjalankan fungsinya dengan menggunakan pengaruhnya untuk memotivasi dan mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal.
- c. Sebagai penghubung (*Liaison*) Seorang pemimpin menjalankan fungsinya sebagai penghubung dengan orang diluar lingkungannya, disamping ia juga harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara atasan dalam berbagai level dengan bawahannya.

2. Peran Pembuat Keputusan (*Decision Making*)

Ada empat fungsi pemimpin yang berkaitan dengan keputusan yaitu:

- a. Sebagai perubahan (*Enterpreneurial*) Pemimpin harus mampu menguasai pengembangan proyek dan menyusun sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu pemimpin harus memiliki sikap proaktif dan mampu berfikir kedepan.
- b. Sebagai Penghalau/Penghambat Gangguan (*Disturbance Handler*)

Pemimpin sebagai penghambat gangguan harus bersikap reaktif terhadap masalah dan tekanan situasi.

- c. Sebagai Pembagi Sumber daya (*Resource Allcator*) Disini pemimpin harus dapat memutuskan kemana saja sumber dana akan distribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Sumber dana ini mencakup uang, waktu, perbekalan, tenaga kerja, dan reputasi.
- d. Sebagai Pelaku Negosiasi (*Negotiator*) Seorang Pemimpin harus mampu melakukan negosiasi pada setiap tingkatan, baik dengan bawahan, atasan maupun pihak luar. Organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuan serta mampu memenuhi tanggung jawab sosialnya akan segera tergantung pada para pemimpinnya. Apabila pemimpin mampu melaksanakan fungsi-fungsi dengan baik, sangat mungkin organisasi tersebut akan dapat mencapai sasarnya.

3. Peran Sumber Informasi (*Informatioanal Roles*)

Seringkali pemimpin harus menghabiskan banyak waktu dalam urusan menerima dan menyebarkan informasi. Ada tiga fungsi Pemimpin disini:

- a. Sebagai Pengawasan (*Monitor*) Untuk mendapatkan informasi yang valid, Pemimpin harus melakukan pengamatan dan pemeriksaan secara kontinyu terhadap lingkungannya, yakni terhadap bawahannya, atasan, dan selalu menjalani hubungan dengan pihak luar.

- b. Sebagai Penyebar (*Disseminator*) Pemimpin juga harus mampu menyebarkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya.
- c. Sebagai Juru Bicara (*Spokes Person*) Sebagai juru bicara, pemimpin berfungsi untuk menyediakan informasi bagi pihak luar.

5. Konsep Pemerintah Kelurahan

Pemerintah merupakan suatu ilmu dan seni .dituturan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintah yang tidak memiliki pendidikan pemerintah, mampu berkaitan serta bersama dengan kharismatik dalam menjalankan roda pemerintahan. sedangkan dikaitkan sebagai seatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena mencakupi syarat-syaratnya yaitu dapat diajarkan dan bisa dipelajari, mempunyai objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, serta spesifik dan sistematis.

Kata pemerintah berasal dari kata pemerintah yang berani melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki 4 unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan setelah mendapatkan awal “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi mengurus. Setelah tambah akhiran “an” menjadi pemerintahan menjadi perbuatan, cara atau perihal.

Dalam bukunya Inu Kencana Syafie (2011: 8) secara etimologi dikatakan sebagai berikut;

1. Pemerintah berani melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.

2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Menurut Ndraha (dalam Maulidiah, 2014 :11) menjelaskan bahwa pemerintah adalah sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antara individu dengan kelompok, sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan dan gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat.

Sedangkan konsepsi pemerintah berdasarkan Rasyd dalam Giroth (dalam Maulidiah, 2014) menyatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintah memaknai sebagian proses yang diambil menurut hukum kepada setiap pribadi warga Negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bangsa bersama. Selanjutnya tugas pokok pemerintah dalam dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu;

- a. Pelayanan (*service*)
- b. Pemberdayaan (*empowerment*)
- c. Pembangunan (*development*)

Selanjutnya pengertian Kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 229 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku

perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inti dari Undang Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah masing-masing untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan merupakan pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Kemudian lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi pemerintah kelurahan dijelaskan didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Tentang Pementukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok secretariat daerah, secretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru yaitu pada Bab VII Bagian ketiga tugas Pokok pasal 37.

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976:17)

Sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang

dikehendaki (Utrecht, 1986: 28). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112).

Pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (C.F.Strong).

Samuel Edward Finer (Syafii, 2004:5) dalam bukunya yang terkenal *Comparative Government*, mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), harus mempunyai Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), mempunyai pejabat pemerintah (*the duty*) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (*manner, method, and system*) terhadap rakyatnya.

Menurut Suhady dalam W. Riawan Tjandra (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.

Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto (2009: 25) adalah: merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin di kutip Istianto (2009: 25) bahwa: Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwaju dan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang di lukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar. Ryas Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu;

1. Fungsi pelayanan (public service)
2. Fungsi pembangunan (development)
3. Fungsi pemberdayaan (empowering)
4. Fungsi pengaturan (regulation)

Pemerintah Kelurahan adalah pemerintah yang membawahi pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah Kecamatan didaerah Kabupaten/Kota, dapat berfungsi sebaga unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada Lurah. Sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan Camat.

Pemerintah kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat diwilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat; seperti pelayanan kelengkapan data untuk pembuatan KTP, pencatatan akta tanah, pelayanan keterangan untuk kesehatan, penyuluhan masyarakat, tata pembagian air untuk pertanian (irigasi) dan sebagainya. Pembentukan kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah melalui analisis potensi daerah, beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, responsivitas, fleksibilitas, rasionalitas, rentang kendali dan akuntabilitas.

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten yang berada di bawah kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasil dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

6. Konsep Pemberdayaan

Menurut (Widjaja, 2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (breakdown) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (dipedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses partisipatif yang memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan, hal ini akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan setempat dan mempertajam keberlanjutan program karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan.

Upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.

● Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menumbuh kembangkan potensi masyarakat, meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan,

mengembangkan gotong-royong, bekerja bersama masyarakat, berbasis masyarakat, kemitraan organisasi masyarakat lain serta desentralisasi. Keberadaan prinsip pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat, sehingga serangkaian kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik.

Meskipun “prinsip” biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans (1961) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan.

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip: Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) mempengaruhi semangatnya mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa-masa mendatang; Asosiasi, artinya kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya.

Misalnya, dengan melibatkan cangkul orang diingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik; melihat tanaman kerdil/subur, akan mengingatkannya kepada usaha-usaha pemupukan, dll.

● Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut kartasmita (1997) menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek

dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsepdemikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan berikut.

Upaya itu harus terarah (targeted). Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

Pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya, supaya bantuan tersebut selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan pengalaman efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka, dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri- sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah- masalah yang dihadapinya.

• Tahapan, Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Menurut United Nations (1956:83-92 dalam Tampubolon, 2006), proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. *Getting to know the local community*; Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

- b. *Gathering knowledge about the local community*; Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut.
- c. *Identifying the local leaders*; Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "the local leaders" harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
- d. *Stimulating the community to realize that it has problems*; Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhannya yang perlu dipenuhi.
- e. *Helping people to discuss their problem*; Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.
- f. *Helping people to identify their most pressing problems*; Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

- g. *Fostering self-confidence*; Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
- h. *Deciding on a program action*; Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
- I. *Recognition of strengths and resources*; Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
- J. *Helping people to continue to work on solving their problems*; Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.
- K. *Increasing people's ability for self-help*; Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

• Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Teknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya karena tidak pernah mengikut sertakan partisipasi masyarakat (*top down*), sehingga si pemberian proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakat di daya gunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktif.

Menurut Adimihardja dan Harry (2001: 15) konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat).

• Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2012:113-117) Lingkup kegiatan Pemberdayaan terdiri dari: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan.

a. Bina Manusia

Lingkup pemberdayaan dalam bina manusia difokuskan kepada 2 hal yaitu:

1. Upaya Peningkatan Kemampuan Masyarakat
2. Upaya peningkatan posisi tawarmasyarakat

b. Bina Usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal, seperti:

1. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk.
2. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan.
3. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal.
4. Peningkatan aksesibilitas terhadap: modal, pasar, dan informasi.

c. Bina Lingkungan

Pembangunan telah membawa dampak negatif sebagai pencemaran lingkungan akibat dari adanya limbah industri dan rumah tangga. Menghadapi kegiatan tersebut, upaya pemberdayaan terhadap kesadaran lingkungan (sumber daya alam dan lingkungan hidup) sudah saatnya memperoleh perhatian yang serius.

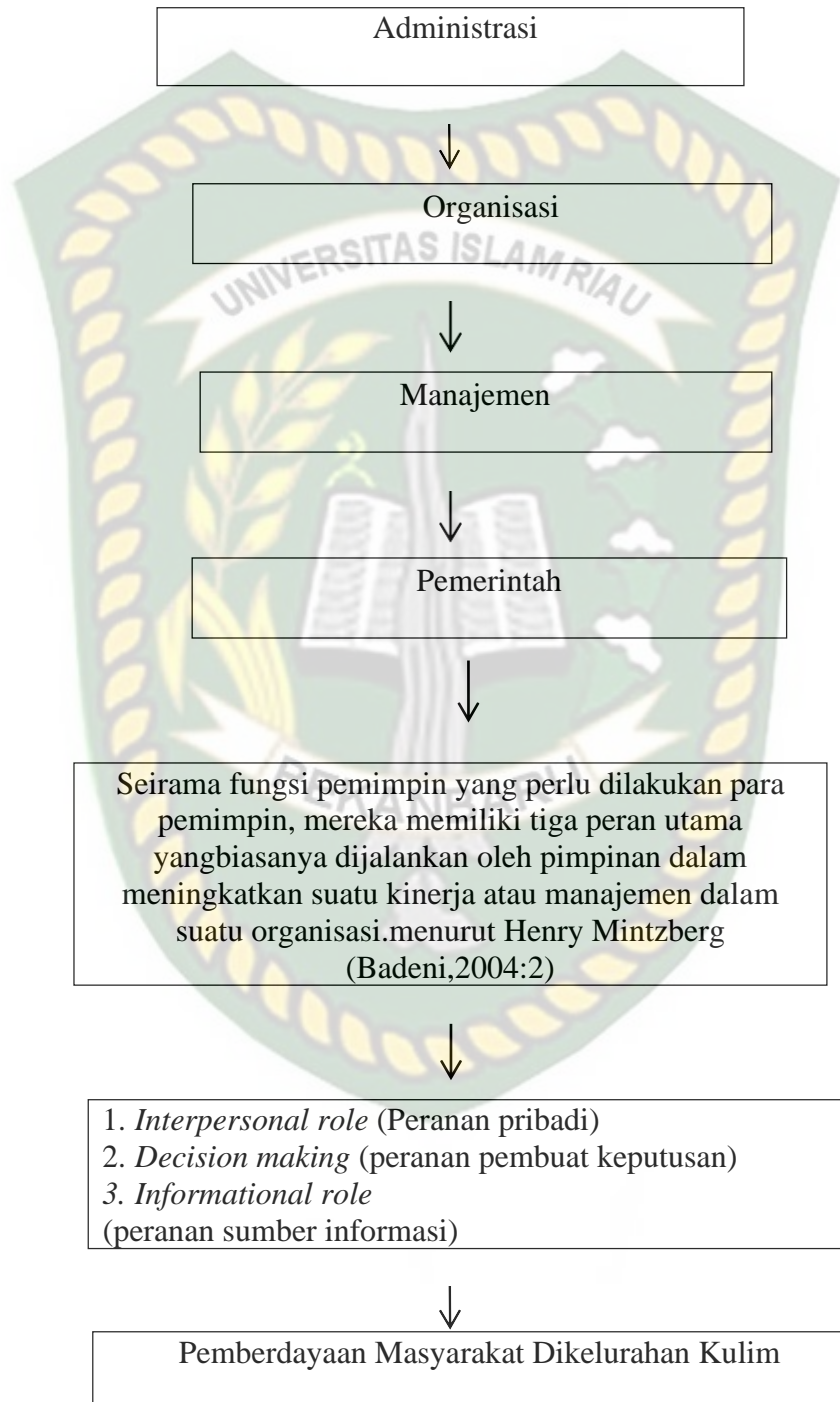
d. Bina Kelembagaan

Bina kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi yang jauh lebih penting adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah berfungsi secara efektif.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapat dibuat suatu kerangka Pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Peran Lurah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru.



Sumber: Modifikasi Penulis 2021

C. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep – konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

1. Administrasi adalah keseluruhan aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh unsur penyelenggaraan Negara yaitu Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Organisasi adalah wadah berhimpunya sekelompok manusia karena memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dalam rangka mencapai tujuan.
3. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penysunan, pengarahan, dan pengawasan sumberdaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Seirama fungsi pemimpin yang perlu dilakukan para pemimpin, mereka memiliki tiga peran utama yang biasanya dijalankan oleh pimpinan dalam meningkatkan suatu kinerja atau manajemen dalam suatu organisasi.
 - Interpersonal role (Peranan pribadi)
 - Decision making (peranan pembuat keputusan)
 - Informational role (peranan sumber informasi)
5. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status kepala Kelurahan Kulim Kota Pekanbaru.
6. Pemerintah dalam Penelitian ini adalah Kantor Kelurahan Kulim Kota

Pekanbaru.

7. Masyarakat Penggerak dalam penelitian ini masyarakat yang ikut atau terlibat dalam program-program tersebut, dan masyarakat biasa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel II. 2: Konsep Oprasional Variabel Peran Pemerintah Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
<p>Seirama fungsi pemimpin yang perlu dilakukan para pemimpin, mereka memiliki tiga peran utama yang biasanya dijalankan oleh pimpinan dalam meningkatkan suatu kinerja atau manajemen dalam suatu organisasi. menurut Henry Mintzberg (Badeni, 2004:2)</p>	<p>Peran Pemimpin Pemerintah Kelurahan Kulim Kota Pekanbaru</p>	<p>a. Peranan Pribadi (<i>Interpersonal role</i>)</p>	<p>a. Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi b. Peran pemimpin bertindak untuk mendorong pegawai bekerja secara efektif dan efisien, serta mempengaruhi mereka agar kerja secara optimal mencapai tujuan. c. Peran Prantara, pemimpin ikut terlibat dalam masalah pegawai</p>
		<p>b. Peran pembuat keputusan (<i>Decision making</i>)</p>	<p>a. Peranan Perubahan b. penangan gangguan c. pengalokasian sumber daya d. juru runding</p>
		<p>c. Peranan Sumber informasi (<i>informational role</i>)</p>	<p>a. memantau secara terus menerus, memperoleh data, pesan atau informasi. b. menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarkan luaskan keseluruh bagian organisasi. c. sebagai juru bicara</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sehingga dapat diketahui metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan suatu dengan cara sistematis.

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, berawal dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian Deskriptif Kualitatif.

Menurut Faisal, (1990) penelitian deskriptif adalah penelitian yang melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Model penelitian kualitatif biasanya digunakan di pengamatan dan penelitian sosial. Sugiyono (2016: 9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama dimana peneliti menangkap suatu fenomena yang terjadi disekitar atau

peristiwa yang benar-benar terjadi darisuatu objek yang akan diteliti dengan tujuan untuk memperoleh suatu data yang akurat dan benar.

Penelitian ini berlokasi di kelurahan kulim kecamatan kulim kota Pekanbaru, adapun alasan penulis memilih lokasi ini dilihat dari fenomena yang ada masyarakat yang mengeluh terhadap kurang peran lurah dalam pemerdayaan masyarakat.

C. Key Informan dan Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang bagaimana latar belakang kondisi Penelitian. Adapun narasumber dari penelitian ini yaitu Kantor Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru, key informan dalam penelitian ini yaitu kepala Kelurahan Kulim. Informan dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Kelurahan Kulim, Kasi Pembangunan dan masyarakat penggerak yang ikut serta dalam pemberdayaan dan masyarakat penerima manfaat.

Tabel III. 1 : Key Informan dan Informan Kantor Kelurahan Kulim Penelitian tentang Peran lurah Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	(%)
1	Camat	1	1	100
2	Lurah Kulim	1	1	100
3	Sekretaris Kelurahan Kulim	1	1	100
4	Kasi Pembangunan	1	1	100
Jumlah		4	4	100

Tabel III. 2 : Masyarakat Peserta/Penerima manfaat

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
1	Bantuan Langsung Tunai	110	1
2	Program Keluarga Harapan	250	2
3	RW	4	2
4	Pembibitan Ikan Lele	10	1
5	Jamur Tiram	10	1
6	Pajalai(Padi,Jagung,dan Kedelai)	15	2
7	Servis Motor	5	1
JUMLAH		404	10

Sumber: Modifikasi Peneliti 202

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, dalam Saputra, 2019). Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk ASN yang terdiri dari (Camat, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat), digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
2. Untuk masyarakat penerima manfaat digunakan teknik penarikan sampel *Purposive sampling*, *Purposive Sampling* atau bisa disebut dengan penghakiman sampel adalah suatu teknik yang disengaja oleh peneliti dari seorang informan berdasarkan kualitas yang dimiliki informan. Teknik ini merupakan nonrandom teknik yang tidak membutuhkan teori atau himpunan yang berdasarkan jumlah himpunan. (Bernard 2002, Lewis & sheppard 2006)

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari lapangan. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa

pihak atau informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Peneliti mendatangi para informan dan melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah. Informan yang dipilih adalah orang yang benar-benar berkompeten, bersedia memberikan data dan informasi serta paham atau merupakan pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian sehingga hasil yang didapatkan relevan dengan kebutuhan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, dan arsip serta laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini sehubungan dengan kegiatan-kegiatan mengenai peran lurah dalam pemerdayan masyarakat.

2. Wawancara

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan

responden, penulis menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat yang dijadikan oleh penulis sebagai alat bantu untuk mewawancarai responden dalam proses pengumpulan data dan informasi.

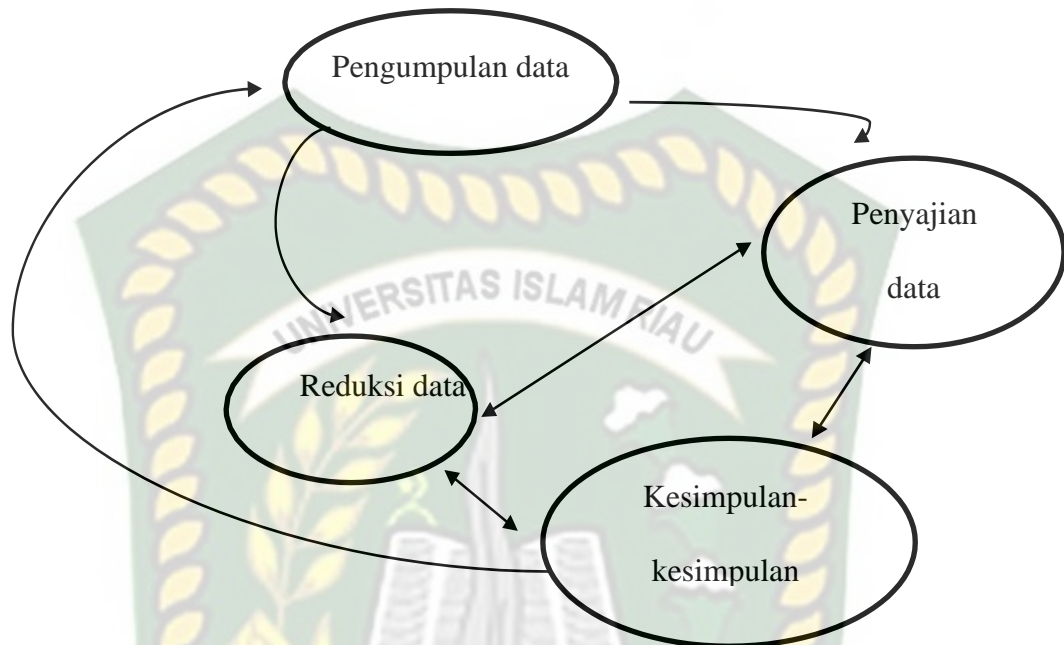
3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada penelitian ini dalam bentuk foto, gambaran dan lain-lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Foto-foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui alat berupa daftar wawancara lalu dikumpulkan, selanjutnya dikumpulkan dan diolah secara kualitatif. kemudian dipresentasikan dan jelaskan dan serta dianalisis secara deskriptif sesuai dengan data yang didapat guna menganalisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut. Kemudian diambil kesimpulan pembahasan tersebut. Secara siktimatis proses analisis data menggunakan proses analisis data menggunakan model analisis data dan intraktif miles dan huberman dapat dilat pada gambar berikut:

Gambar III. 1: Model analisis data dan interaktif Miles dan Huberman



Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021

a. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah- memilah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemiloihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo

dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

c. Penyajian data (*DataDisplay*)

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, table, bagan, dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan (*ConclusionDrawing/Verivication*)

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian yang dimulai pada bulan Maret 2021 sampai dengan Juli 2021. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III. 3: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Peran Lurah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru.

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan minggu ke																			
		Maret-April				Mei-Juni				Juli-AGUSTUS				Septemb er-Oktober				Novembe r-Desembe r			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Penyusunan Proposal																				
	Ujian Proposal																				
3	Revisi Proposal																				
4	Kuesioner																				
5	Rekomendasi Survey																				
6	Survey Lapangan																				
7	Analisis Data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Konfhensif Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Pengandaan Skripsi																				

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kota Pekanbaru adalah ibu kota terbesar di provinsi Riau Indonesia. Kota ini termasuk sebagian kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Riau, yang menyandang predikat sebagai Ibu Kota Provinsi. Sehingga Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi di Riau. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, dan juga pelaksanaan otonomi daerah. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang menjadi yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam pencapaian kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 00° 25' - 00° 45' Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 km². Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;

Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi dan Misi Kota Pekanbaru 2021 sebagai mana tertuang sesuai peraturan daerah kota pekanbaru No. 1 Tahun 2001 yaitu :

a. Visi

“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu. Menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa”

b. Misi

“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal nasional maupun internasional

A. Sejarah kelurahan Kulim Kota Pekanbaru.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang mana wilayah kerjalurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan harus dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan ialah unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Kelurahan Kulim merupakan suatu wilayah yang berada di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang memiliki luas wilayah sekitar 51,50 KM² atau 51.500 Ha, yang terdiri dari 09 RT / 04 RW dan memiliki ketinggian wilayah 60 M Dpl (di atas permukaan laut).

Berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2003 dan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 578 Tahun 2003, Kelurahan Kulim memiliki

batas:

- a) Sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Pelalawan / Siak
- b) Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Sail Kecamatan Bukit Raya
- c) Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Sail / Kabupaten Kampar
- d) Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Tangkerang Timur, Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya.

Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Kulim berjumlah 22.381 dengan perincian: Laki-Laki sebanyak 13.298 dan Perempuan sebanyak 9083. Pada umumnya masyarakat adalah masyarakat heterogen baik ditinjau secara sosial maupun ekonomi. Mata pencaharian penduduk lebih didominasi oleh petani, buruh, pedagang, dan sebagian kecil pengrajin, PNS, sebagai daerah yang berpotensi dan berkembang, maka daerah ini akan mengalami jumlah penduduk yang akan terus meningkat.

Kelurahan Kulim dalam mewujudkan maksud dan tujuannya memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

- a. Visi : Terwujudnya Kelurahan Kulim sebagai tempat pemukiman, yang asri dan bersih serta pusat pertanian dan peternakan.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 2) Memberdayakan masyarakat

Kemudian Pekanbaru, Riau, meresmikan 25 kelurahan sebelumnya jumlah kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru 58 kelurahan setelah di

sahkan(Perda)Nomor 4/2016 oleh DPRD menjadi 83 kelurahan di Kota Pekanbaru, termasuklah Kelurahan Kulim di mekarkan menjadi 3 kelurahan yaitu

1. Kelurahan Pematuan
2. Kelurahan Sialang Rampai
3. Kelurahan Mentangor.

Kelurahan Kulim mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar sekitar 22,381 jiwa (2010) karna semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada diKelurahan Kulim secara otomatis juga turut semakin meningkatkan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan .

Tabel 4.1 :Pasca Pemekaran dan Sebelum Pemekaran

Kelurahan Sebelum Pemekaran	Kelurahan Setelah Pemekaran
1. Kelurahan Kulim	1. Kelurahan Kulim
	2. Kelurahan Pematuan
	3. Kelurahan Sialang Rampai
	4. Kelurahan Mentanggor

Sumber data : Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2016

Kemudian peraturan walikota pekanbaru tentang batas wilayah kelurahanpada kecamatan tenayan raya di kelurahan kulim, kelurahan mentangor, kelurahan pematuan dan kelurahan sialang rampai kelurahan mentangor berdasarkan Nomor 188 Tahun 2017 yang jatuh pada tanggal 01 Agustus 2017 sebagai berikut:

TABEL 4.2 :Peraturan Walikota Pekanbaru Tentang Batas Wilayah Kelurahan PadaKecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No	Kelurahan	Batas wilayah
1	Kulim	<ul style="list-style-type: none"> - Utara Kelurahan Tuah Negeri - Timur Berbatasan dengan jalan maredan kabupaten siak - Selatan Berbatasan dengan jalan lintas timur kelurahan sialang rampai, kabupaten Kampar - Barat jalan binjai (kelurahn Kulim)
2	Mentangor	<ul style="list-style-type: none"> - Utara bukit rahayu (kelurahan tangkerang timur), jalan kenanga, jalan budi luhur (kelurahan sianglang sakti) - Timur jalan binjai raya (kelurahan kulim) - Selatan jalan lintas timur (kelurahan sialang rampai) - Barat jalan sepatat (kelurahan pebatuan, kelurahan pematang kapau)
3	Pebatuan	<ul style="list-style-type: none"> - Utara jalan pesantern Meranti (Kelurahan Pematang Kapau) dan (Kelurahan Mentangor) - Timur jalan Binjay Raya (kelurahan Pebatuan) - Selatan Sungai Sail Kabupaten Kampar) - Barat Sungai Sail (Kecamatan Bukit Raya)
4	Sialang Rampai	<ul style="list-style-type: none"> - Utara Jalan lintas Timur(Kelurahan Kulim) - Timur Sungai Sail (kabupaten kampar) - Selatan Sungai Sail (Kabupaten Kampar) - Barat anak sungai Sail dan jalan Seroja (kelurahan Pebatuan)

Sumber data : peraturan Walikota Pekanbaru

B. Kondisi Umum Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

a. Letak dan Geografis

Kelurahan Kulim merupakan suatu wilayah yang berada di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang memiliki luas wilayah sekitar 51,50 KM² atau 51.500 Ha, yang terdiri dari 71 RT /19 RW dan memiliki ketinggian wilayah 60 M Dpl (di atas permukaan laut). Pada saat ini kelurahan kulim sudah terjadinya pemekaran berdasarkan peraturan daerah kotapekanbaru No 4 Tahun 2016 tentang pembentukan kelurahan di kota pekanbaru, kelurahan kulim terbagi menjadi 4 kelurahan

1. Kelurahan kulim
2. Kelurahan pebatuan
3. Kelurahan sialang rampai
4. Kelurahan mentangor

Kelurahan kulim mempunyai jarak tempuh ke ibu kota pekanbaru 2km dan menggunakan kendaraan sepeda motor sekitar 30 menit. Mata pencaharian penduduk lebih didominasi oleh petani, buruh, pedagang, dan sebagian kecil pengrajin, PNS, sebagai daerah yang berpotensi dan berkembang, maka daerah ini akan mengalami jumlah penduduk yang akan terus meningkat.

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam masyarakat. Karena pendidikan dapat meningkatkan status sosial seseorang.

Apabila pendidikan seseorang baik maka taraf hidupnya akan baik juga. Perkembangan zaman sekarang ini yang semakin majudan berkembang perlu adanya pendidikan agar tidak terjadi ketimpanganbudaya mengenai modernisasi.

Jumlah Pendidikan masyarakat dikelurahan Kulim sebagai berikut:

Tabel 4.3 : Jumlah sekolahn keluraha kulim kecamatan kulim kota pekanbaru

No	Jenis Pendidikan	Miliki pemerintah	Miliki swasta	Jumlah sekloah	Ket
1	Play Grup		√	1	Terakreditasi
2	Tk		√	4	Terakreditasi
3	SD/Sederajat	√		2	Terakreditasi
4	SMP/Sederajat	√		1	Terakreditasi
5	SMA/sederajat	√		1	Terakreditasi

Sumber: kantor Kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru.

C. Kehidupan Beragama Dikelurahan Kulim Kota Pekanbaru

Agama adalah sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakatataupun suatu sistem yang mengatur tata keimanan seseorang (kepercayaan).Mayoritas masyarakat Kelurahan Kulim beragama Islam.Dan minoritas jugaterdapat beberapa agama lainnya.Walaupun berbeda kepercayaan tetap terdapat kerukunan untuk menjalankan ibadah.Dapat dilihat dari aktivitasmasyarakat dalam menjalankan syariat agama, sekaligus pengikut antar umat beragama.

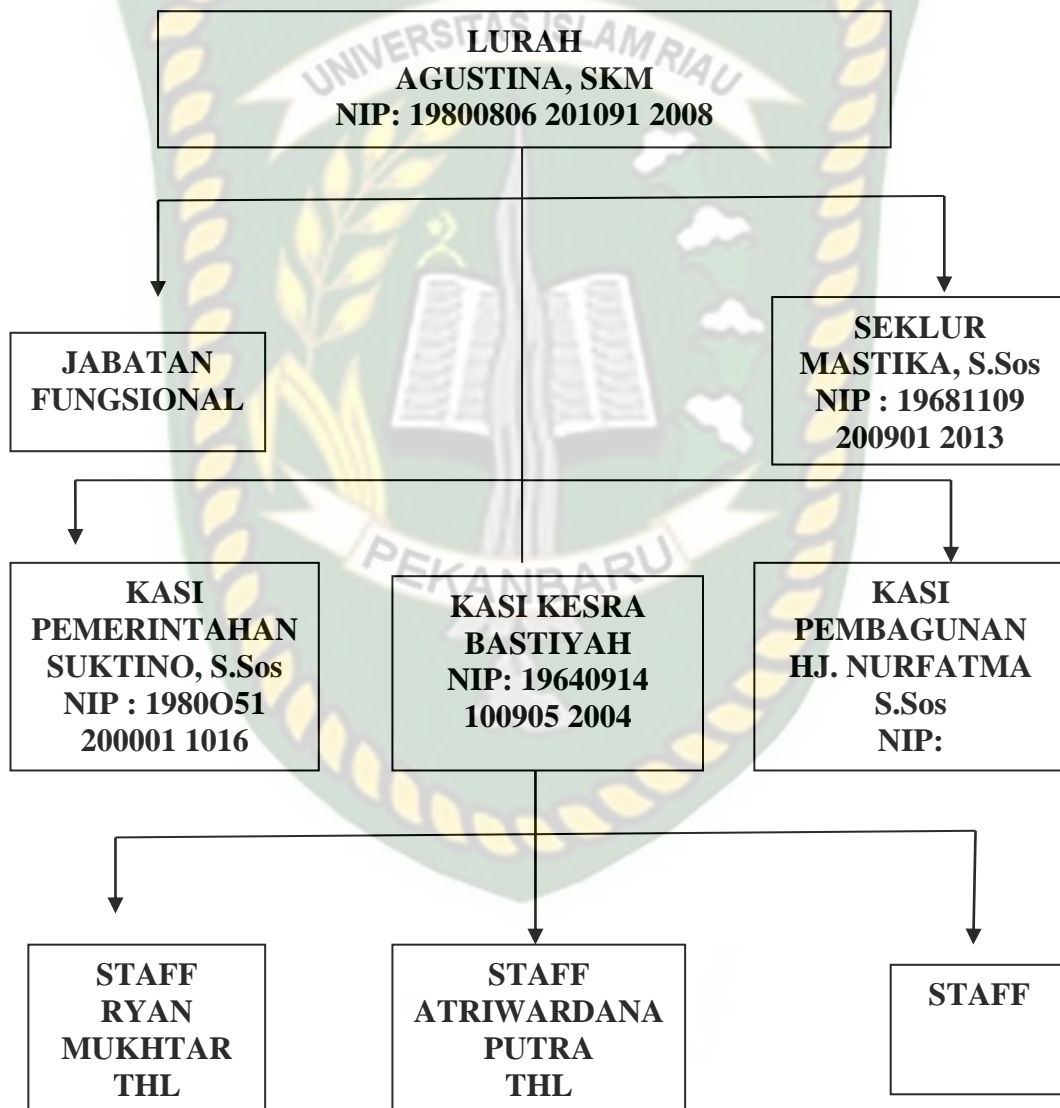
Tabel 4.5 : Sarana prasarana peribadatan Masyarakat Kelurahan kulim kecamatan kulim kota pekanbaru

No	Jenis Pribadatan	Jumlah
1	Mesjid	15
2	Mushola/Surau	14
3	Greja	8
Jumlah		37

Sumber data : kecamatan tenayan raya Kota Pekanbaru

D. Struktur Organisasi Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru

**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KULIM
KECAMATAN KULIM KOTA PEKANBARU**



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru. Penelitian mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari camat 1 orang, Lurah 1 orang dan masyarakat/Rw 10 orang. Adapun identitas responden dalam penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikan adalah seperti tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1. identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase(%)
1	SLTA/ sederajat	10	83,3 %
2	Diploma	-	-
3	Sarjan(S1)	2	16,7%
4	Sarjan (S2)	-	-
Jumlah		12	100%

Sumber data: Data Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dari 12 orang (83,3%) responden penelitian, sebanyak 10 orang atau diantaranya berpendidikan SLTA/ sederajat, dan responden yang berpendidikan Sarjan (S1) 2 orang (16,7%). Dengan demikian sebagian besar responden adalah berpendidikan SLTA/ sederajat.

Selanjutnya Identitas responden dalam penelitian ini berdasarkan tingkat

umurnya adalah seperti tertera pada tabel pada bawah ini:

Tabel V.2. Identitas responden berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	≤ 30 tahun	-	-
2	31-40 tahun	11	91,7%
3	41-50 tahun	1	8,3%
4	≥ 50 tahun	-	-
Jumlah		12	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 12 orang responden penelitian sebanyak 11 orang (91,7%) reponden berumur 31-40 tahun, dan selanjutnya 1 orang(8,3%) Responden atau berumur 41-50 tahun. Dengan demikian sebagai besar responden adalah berumur 31-40 tahun.

B. Hasil Penelitian dan pembahasan Peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan kulim kecamatan kulim kota pekanbaru

Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan dalam penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahn Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru adalah berdasarkan teori dari Henry Mintzberg (Badani, 2004:2). Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencaei hasil dari penelitian ini adalah Peran Pribadi, SEBAGAI SIMBOL Organisasi, sebagai Pemimpin, sebagai penghubung. Peran Pembuat Keputusan, sebagai pengusaha, sebagai penghambat gangguan, sebagai pembagi sumber dana, sebagai pelaku negosiasi. Peran Sumber Informasi,

sebagai pengawas, sebagai penyebar informasi, sebagai juru bicara.

1. Peran Pribadi

Apabila Pencapaian tujuan-tujuan dari pada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula tindakannya. Pengertian tersebut dapat dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar dari pada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Fungsi ini dapat ditingkatkan melalui jabatan formal yang dimiliki oleh seseorang pemimpin dan antara pemimpin dengan orang lain. Fungsi interpersonal terbagi menjadi 3, yaitu:

1.1 Sebagai Simbol Organisasi (*Figur Head*)

Kegiatan ini dilakukan dalam menjalankan fungsi simbol organisasi umumnya bersifat resmi, seperti menjamu makan siang, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada dimasyarakat atau ikut serta dalam program yang dimasyarakat dan memberi contoh, seperti perilaku lurah atau pemimpin bagi organisasi. Kegagalan yang sering terjadi dalam peran pemerintah adalah pemimpin yang tidak bisa menjadi simbol atau contoh bagi organisasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kelurahanibu Agustina, pada tanggal, 23 Agustus 2021 Kulim Kota Pekanbaru mengenai peran pemerintah tersebut, ia mengatakan bahwa:

“ Dalam hal memberi contoh kepada staf saya, saya sering datang tepat waktu. Dan pulang dengan tepat waktu, dan masih banyak contoh yang saya berikan kepada staf saya.”

Mengenai masalah peran pemerintah sebagai simbol organisasi penulis juga melakukan wawancara dengan skretaris Lurah ibu Mastika, pada tanggal 23 Agustus 2021.yang mengatakan bahwa:

“ lurah sering sekali datang terlambat, terkadang luruh juga jarang masuk ke kantor dan selalu pulang lebih awal”

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah sebagai simbol organisasi belum melakukan perannya sebagai simbol organisasi atau belum bisa memberi contoh kepada bawahan dan masyarakat.

1.2 Sebagai Pemimpin (*Leader*)

Seorang pemimpin menjalankan fungsinya dengan menggunakan pengaruhnya untuk memotivasi dan mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kelurahan KulimIbu Agustina, tanggal 23 Agustus 2021 mengenai peran pemerintah tersebut, ia mengatakan bahwa:

“Sebagai kepala kelurahan sering memberi motivasi kepada bawahan. Dan kepada masyarakat juga sering memberi motivasi dan dorong

dalam setiap kegiatan atau program yang ada ”

Mengenai masalah peran pemerintah sebagai simbol organisasi penulis juga melakukan wawancara dengan sekretaris ibu mastika tanggal 23 Agustus 2021 yang mengatakan bahwa:

“ Lurah sebagai kepala lurah memberikan motivasi dan dorongan terhadap stafnya untuk mencapai tujuan yang maksimal”

Mengenai masalah peran pemerintah sebagai simbol organisasi penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat yaitu ibu Cut, tanggal 27 Agustus 2021) yang mengatakan bahwa:

“ Dalam Pertemuan lurah, jarang memberikan motivasi. Dalam pertemuan.”

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah sebagai pemimpin melakukan tugasnya dengan baik, untuk mencapai tujuan organisasi.

1. 3 Sebagai penghubung (*Liaison*)

Seorang pemimpin menjalankan fungsinya sebagai penghubung dengan orang diluar lingkungannya dan melakukan penghubung atau prantara antar masyarakat dan pihak lain, disamping ia juga harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara atasan dalam berbagai level dengan bawahannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kelurahan Kulim Kota Pekanbaru, Ibu Agustina tanggal 23 Agustus 2021 mengenai peran pemerintah tersebut, ia mengatakan bahwa:

“Sebagai kepala kelurahan saya melakukan hubungan yang baik kepada staf saya dan pihak luar dan melakukan hubungan yang baik juga terhadap masyarakat”.

Mengenai masalah peran pemerintah sebagai penghubung penulis juga melakukan wawancara dengan staf bapak ryan, tanggal 23 Agustus 2021 yang mengatakan bahwa:

“ Dalam hal ini kepala lurah selaku pemimpin, memiliki peran penghubung dalam dirinya. Saya sebagai stafnya lurah belum mampu menghubungkan pihak luar dalam organisasi ini”.

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah sebagai penghubung dalam hal ini pemimpin atau lurah disini belum bisa melakukan tugasnya dengan baik, untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Peran Pembuat Keputusan (*Decision Making*)

Pengambilan keputusan merupakan bukan suatu hal yang mudah dan cepat untuk diselesaikan, namun juga melalui berbagai macam pertimbangan. Terkadang pemimpin mengalami dilema saat mengambil keputusan lalu menghasilkan keputusan yang salah dan merugikan organisasi serta bawahannya. Maka dari itu seorang pemimpin juga membutuhkan pendapat-pendapat dari anggotanya.

Hasil dari kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William n Dunn mengemukakan bahwa hasil berkenaan dengan berapa jauh suatu tingkat tindakan memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesepakatan yang menumbuhkan adanya

masalah (Dunn,2003: 430). Dari hasil pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil masih berhubungan dengan tindakan dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Ada empat fungsi pemimpin yang berkaitan dengan keputusan yaitu:

2. 1 Sebagai Perubahan(*Enterpreneurial*)

Pemimpin harus mampu menguasai pengembangan program yang ada diorganisasi dan menyusun sumberdaya yang diperlukan. Untuk melakukan perubahan yang baik untuk organisasi dan masyarakat yang disikitar organisasi tersebut. Oleh karena itu pemimpin harus memiliki sikap proaktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kelurahan Kulim Kota Pekanbaru Ibu Agustina, tanggal 23 Agustus 2021, mengenai peran pemerintah tersebut, ia mengatakan bahwa:

“Selaku kepala kelurahan mampu dalam mengembangkan program dan membuat perubahan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat saya atau menyusun sumber daya, sebab selaku kepala lurah harus bisa menguasai hal tersebut. Jika terjadi sesuatu saya langsung bisa untuk mengambil keputusan”

Mengenai masalah peran pemerintah sebagai pengusaha penulis juga melakukan wawancara dengan kasi pembangunan Ibu Nurfatma, tanggal 23 Agustus 2021 yang mengatakan bahwa:

“ Dalam pengembangan program atau melakukan perubahan untuk masyarakat dan kantornya, lurah selalu melakukan yang terbaik supaya program tersebut berjalan dengan maksimal”.

wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah sebagai Perubah dalam hal

ini pemimpin atau lurah disini melaksanakan tugasnya dengan baik, untuk mencapai tujuan organisasi dan masyarakat.

2.2 Sebagai Penghalau/Penghambat Gangguan (*Disturbance Handler*)

Sebagai seorang pemimpin harus bisa melakukan penghambat gangguan yang ada didalam organisasinya atau dalam sebuah program yang akan dijalankannya, apaun itu hambatan atau gangguan yang terjadi lurah sebagai kepala pemimpin disebuah organisasi, maka dia harus mencari solusi atau mengahalau gangguan itu sendiri, agar organisasi yang dipipin oleh lurah berjalan dengan baik, dengan program-program yang dibuat untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri,harus bersikap reaktif terhadap masalah dan tekanan situasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kelurahan Kulim Kota PekanbaruIbu Agustina, tanggal 23 Agustus 2021mengenai peran pemerintah tersebut, ia mengatakan bahwa:

“ Dalam melakukan Penghambat atau gangguan dari luar atau dari dalam itu sendiri, dan dalam program yang berjalan terdapat gangguan atau penghambat, sebagai kepala lurah. Dalam hal ini melakukan tugas lurah, langsung mencari apa yang terjadi didalam program tersebut agar program terus berjalan dan organisasai jauh dari gangguan dari pihak luar”

Mengenai masalah peran pemerintah sebagai pengusaha penulis jugamelakukan wawancara dengan kasi pembangunan Ibu Nurfatma, tanggal 23 Agustus 2021yang mengatakan bahwa:

“ Kepala lurah berusaha dalam melakukan tugasnyan sebagai lurah atau sebagai kepala. Lurah itu sendiri, mencari tau apa penyebab gangguan atau penghambat dalam organisasi dan dalam program yang dijalannyan atau gangguan dari luar, sebagain pemimpin dia akan berusaha. Walaupun hasilnya belum maksimal.Maka dari itu kami

sebagai stafnya ikut serta dalam membantu dalam gangguan, supaya organisasi ini berjalan dengan baik dan maksimal”.

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah sebagai penghalu atau penghambat gangguan dalam hal ini pemimpin atau lurah disini berusaha dalam melakukan tugasnya dengan baik, untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal.

2.3 Sebagai Pembagi Sumber dana(*Resource Allcator*)

Disini pemimpin harus dapat memutuskan kemana saja sumber dana atau sumber daya akan distribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Sumber dana ini mencakup uang, waktu, perbekalan, tenaga kerja, dan reputasi.

Melakukan wawancara kepada kepala kelurahan kulim kota pekanbaru Ibu Agustina, tanggal 23 Agustus 2021, mengenai pembagian sumber dana

“ sumber dana yang saya lakukan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada”

Mengenai masalah peran pemerintah sebagai pengusaha penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat ibu Ira, pada tanggal 27 Agustus 2021 yang mengatakan bahwa:

“ sumber dana untuk kegiatan atau program yang ada, sering sekali tidak turun kepada kami ini, dalam hal ini kami sebagai masyarakat. Jika dana turun, kami yang menerima tersebut akan membuat usaha kecil-kecilan dari sumber dana tersebut”.

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah sebagai

Pembagi Sumber dana dalam hal ini pemimpin atau lurah disini tidak melakukan sumber dana atau sumber daya dengan baik. Mau itu sumber didalam bentuk waktu dan lain hal sebagainya, lurah disini belum melaksanakan tugas dengan baik. Dalam melakukan perannya sebagai sumber pembagian dana atau sumber daya. Bukan halnya berupa uang tapi berupa waktu. Maksudnya disini peneliti melihat dilapangan bahwa, lurah sebagai pemimpin, sering sekali dia tidak ikut serta dalam kegiatan yang ada dikelurah kulim.

2.4 Sebagai Pelaku Negosiasi (*Negotiator*)

Seorang Pemimpin harus mampu melakukan negosiasi pada setiap tingkatan, baik dengan bawahan, atasan maupun pihak luar. Organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuan serta mampu memenuhi tanggung jawab sosialnya akan segera tergantung pada para pemimpinnya. Apabila pemimpin mampu melaksanakan fungsi-fungsi dengan baik, sangat mungkin organisasi tersebut akan dapat mencapai sasarannya.

Melakukan wawancara kepada kepala kelurahan kulim kota pekanbaru Ibu Agustina, tanggal 23 Agustus 2021, mengenai pelaku negosiasi

“ Sebagai pemimpin mampu dalam melakukan negosiasi antara pihak luar. Sebab saya harus memenuhi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, untuk memajukan organisasi dan memaksimalkannya”.

Mengenai masalah peran pemerintah sebagai pengusaha penulis juga melakukan wawancara dengan skretaris Lurah ibu mastika tanggal 23 agustus 2021, yang mengatakan bahwa:

“ Lurah dalam negosiasi dengan pihak luar melakukan yang terbaik. Sebab lurah berusaha untuk membuat organisasi mencapai tujuan yang

maksimal atau yang baik”.

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa peran lurah sebagai Pelaku Negosiasi dalam hal ini lurah disini melakukan tugasnya dengan baik, untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal.

3. Peran Sumber Informasi (*Informational Roles*)

Tindakan dan proses sangatlah berhubungan. Apabila kita bicara tentang proses bila mana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah proses akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut William N.Dunn berpendapat bahwa : “ Proses (efisiensi) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat-tingkatan tertentu. Proses yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara tindakan dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter, proses biasanya ditentukan melalui perhitungan layanan. Kebijakan yang mencapai tindakan tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi” (Dunn 2003, 430)

Sering kali pemimpin harus menghabiskan banyak waktu dalam urusan menerima dan menyebarkan informasi. Ada tiga fungsi Pemimpin disini:

3.1 Sebagai Pengawasan (*Monitor*)

Untuk mendapatkan informasi yang valid, Pemimpin harus melakukan pengamatan dan pemeriksaan secara kontinyu terhadap lingkungannya dan program yang dijalankan, agar program tersebut berjalan dengan baik dan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien.

Melakukan wawancara kepada kepala kelurahan kulim kota pekanbaru Ibu Agustina, tanggal 23 Agustus 2021, mengenai pengawasan

“ Dalam pengawasan sebagai kepala lurah sering mengawasi setiap kegiatan yang ada dikelurahan ini”. Apapun kegiatan atau program yang ada dikelurahan ini, dalam hal ini, menjalankan tugasnya.

Mengenai masalah peran pemerintah sebagai pengusaha penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat ibu Ita Rt, tanggal 27 Agustus 2021 yang mengatakan bahwa:

“ dalam pengawasan pihak lurah selaku pemimpin di disini jarang sekali melakukan kunjungan atau melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan kepada kami, dalam melakukan kegiatan atau program-program yang dilaksanakan

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa peran lurahan sebagai pengawasan dalam hal ini lurah disini ia belum melaksanakan tugasnya. masih adanya peneliti jumpai program yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

3.2 Sebagai Penyebar (*Disseminator*)

Pemimpin iajuga mampu melakukan menyebarkan kepada pihak-pihak

yang memerlukannya informasi yang ada di kelurahan atau ada program-program untuk pemberdayaan masyarakat.

Melakukan wawancara kepada kepala kelurahan kulim kota pekanbaru Ibu Agustina, tanggal 23 Agustus 2021, mengenai penyebar

“Sebagai kepala lurahan, saya melakukan penyebaran informasi yang terkait, dalam kegiatan yang ada dikelurahan untuk masyarakat. Agar masyarakat bisa ikut serta dalam kegiatan program yang ada dikelurahan ini, dengan cara, memberitahu Rw/Rtnya masing- masing”.

Mengenai masalah peran pemerintah sebagai pengusaha penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat ibu santi tanggal, 27 Agustus 2021 yang mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan penyebaran informasi, sering kali tidak menerima informasi tentang kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh kelurahan”.

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah sebagai penyebar informasi dalam hal ini lurah disini belum melaksanakan tugasnya dengan baik.masih adanya informasi tentang program atau kegiatan yang belum diketahui sama masyarakat terkait, program pemberdayaan yang ada dikelurahan kulim.

3.3 Sebagai Juru Bicara (*Spokes Person*)

Sebagai juru bicara, pemimpin harus mampu melakukannya, sebab dia seorang pemimpin. Contoh bagi bawahannya dan masyarakatnya dan berfungsi untuk menyediakan informasi bagi pihak luar.

Melakukan wawancara kepada kepala kelurahan kulim kota pekanbaru

Ibu Agustina, tanggal 23 Agustus 2021, mengenai juru bicara

“Dalam juru bicara , atau moderator dalam kegiatan atau pertemuan, melakukannya dengan baik supaya organisasi yang saya pimpin berjalan dengan baik dan maksimal”

Mengenai masalah peran pemerintah sebagai pengusaha penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat ibu nory, tanggal 27 agustus 2021 yang mengatakan bahwa:

“ Dalam hal menyediakan informasi dan dalam kegiatan yang ada dikelurahan, lurahnya dan bagi pihak luar, saya sebagai masyarakat jarang sekali melihat ibu lurahnya sebagai juru bicara atau moderator dan menyampaikan informasi kepada pihak luar dan masyarkat”.

Mengenai masalah peran pemerintah sebagai pengusaha penulis juga melakukan wawancara dengan pak RW harmaini tanggal 27 agustus 2021 yang mengatakan bahwa:

“ Dalam hal ini jarang sekali melihat lurah dalam melakukan juru bicara atau moderator dan memberikan kata- kata motivasi kepada masyarakat.

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah sebagai juru bicara kepada masyarakat atau pihak lain, dalam hal ini lurah disini ia belum melaksanakan peran dengan baik.

C. Hambatan – hambatan Peran Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru.

Dari hasil Penelitian dapat ditemukan, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas- tugas masyarakat Kecamatan Kulim untuk menjalankan program pemberdayaan yang telah ditetapkan, hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berartispasi dalam menjalankan program pemberdayaan. Dalam melaksanakan program pemberdayaan yang disusun oleh masyarakat kecamatan kulim , peranan dan partisipatif masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap pemberdayaan tersebut. Tidak semua masyarakat yang mau ikut serta dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh kesibukan masyarakat dalam bekerja dan kurang sadarnya masyarakat akan perannya yang berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan pemberdayaan tersebut hal ini dapat di lihat dari survey lapangan yaitu hanya sebagian besar yang turut dalam kegiatan program pemberdayaan yang akan dilaksanakan.
- b. Lamanya pencairan dalam sehingga proram-program pemberdayaan tidak dapat berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pemberdayaan sangat memerlukan dana guna kelancaran jalannya pemberdayaan. Ada dana tersebut baik berasal dari PEMDA. Tetapi lancarnya program pemberdayaan tidak sejalan dengan lancarannya pencairan dana, hal ini dapat terjadi karena proses pencairan dana yang lama prosedurnya. Berdasarkan survey lapangan masyarakat bertanggung pencairan dana yang dibutuhkan dalam

pemberdayaan tidak tepat waktu dicairkan pihak pemerintah setempat, oleh karena itu pemberdayaan jadi terhambat.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUPAN

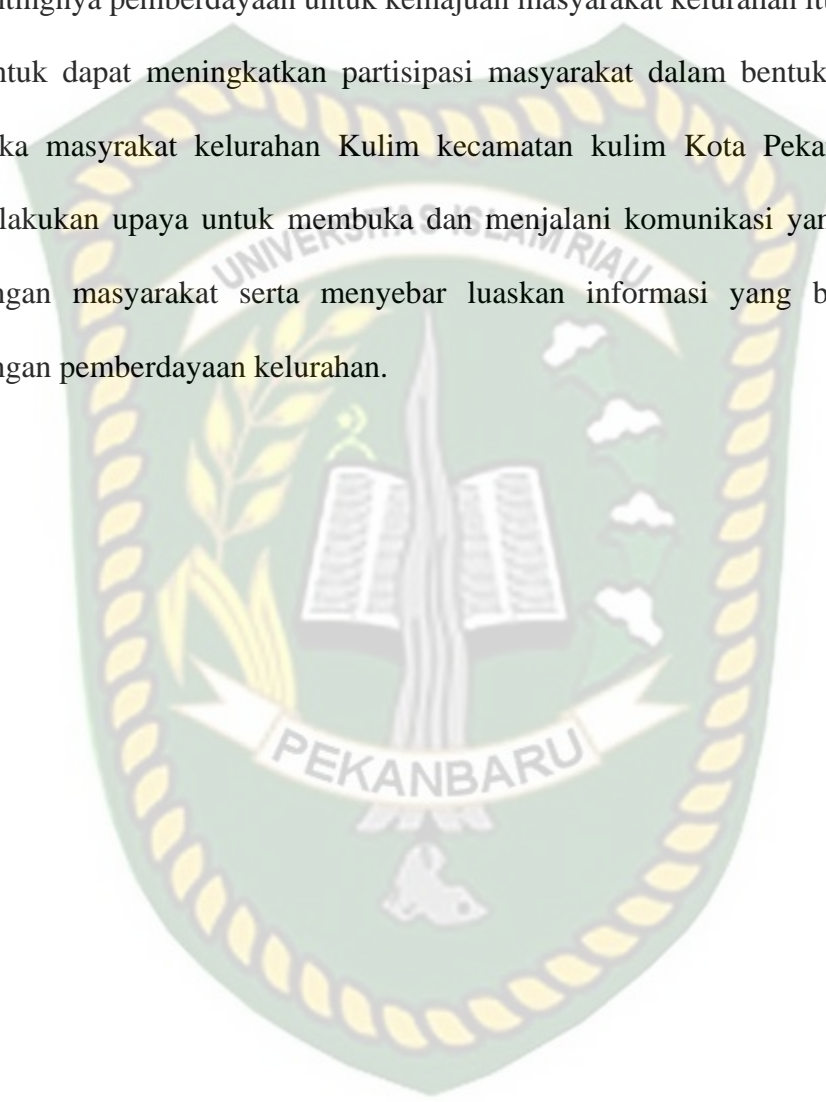
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru Belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih kurang optimal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat karena masih ada dijumpai permasalahan masih kurangnya minat masyarakat yang akan mengikuti program pemberdayaan yang mana ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan pihak kelurahan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui arti penting dari program pemberdayaan ini sehingga tidak semua masyarakat yang ingin ikut partisipasi dalam program pemberdayaan yang dilakukan.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Peran Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan kulim kecamatan kulim Kota Pekanbaru dalam perencanaan program pemberdayaan yaitu:
 - a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pemberdayaan
 - b. Dalam organisasi masyarakat kelurah kulim kecamatan kulim kota pekanbaru masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pemberdayaan tersebut.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah Kelurahan diharapkan untuk mensosialisasikan betapa pentingnya pemberdayaan untuk kemajuan masyarakat kelurahan itu sendiri.
2. Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran, maka masyarakat kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru perlu melakukan upaya untuk membuka dan menjalani komunikasi yang harmonis dengan masyarakat serta menyebar luaskan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan kelurahan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun desa Partisipatif. Graha Ilmu Yogyakarta
- Nurcholis, Hanif 2005 Pemerintahan Dalam Otonomi Daerah. Grasindo. Jakarta
- Siagian, sondang P 2008. Administrasi Pembangunan. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat memberdaya rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama
- Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho. 2008. Paradigma, model, Pendekatan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Era Otonomi Daerah. Malang: Bayu Media Publishing
- Sugiyono. 2016 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Bandung: PT Alfabet
- Syafiie, Inu Kecana 2003 Kepemimpinan Pemerintah Indonesia. Bandung. Repika Aditama
- Syarifin , Jubaedah Deah. 2006. Pemerintah Daerah Indonesia . Cv. Pustaka Setia bandung
- Tahir Malik, dangnga M.S, A. Muhibuddin, Sulkipli Syamsiar, 2010, Metodologi Penelitian dan Aplikasi, Pustaka Pena Press, Makassar
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2013, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.
- Wasistiano, Sadu Dan Tahir, 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung. Focus Media
- Zulkifli, yogya.2004 fungsi- fungsi manajemen. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Dokumentasi

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang 32 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang kecamatan

Jurnal

Arnanda, H. (2017) Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Di
Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Ktai Kartenegro)
JURNAL UNIVERSITAS MULAWARMAN, 1(3), 956-964

Iskandar, I., Resmawan, E., & Dyastari, I., (2018) PERAN LURAH DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LOKBAHU
KOTASEMARANG

Pelenkahu, M. G., Gosal, R., & Sambiran, Sambiran, S. (2017). PERAN LURAH
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di kelurahan
Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manodo). Jurnal EKSEKUTIF,
2(2)

Wardani, K. A. K., Pascarani, N. N. D., & Supriyayani, W. (2015). Peran Kepemimpinan
Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus: Kelurahan Samplangan,
Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Udayana University



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat: Jalan Sekeloa Timur No. 113 Pekanbaru, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
 Telp: +62707014074 Faks: +62707014034 Email: info@iur.ac.id, web@iur.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 3937/A_UiR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Rantika Listihara
 Npm : 177110474
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru.
 Persentase Plagiasi : 24 % (411 tetapan)
 Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dan Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Tumit* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 November 2021

Hormat Kami,
 Wakil Dekan Bid. Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si
 NPK: 970702230